



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Laporan Empat Bulanan PPID Kementerian Keuangan

Periode Bulan Januari s.d. April Tahun 2019

---

PPID Kementerian Keuangan  
Gedung Djuanda I Lantai G Kementerian Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1  
Jakarta Pusat, 10710  
(021) 386.1489  
[ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id)

---

## A. Layanan Informasi Publik

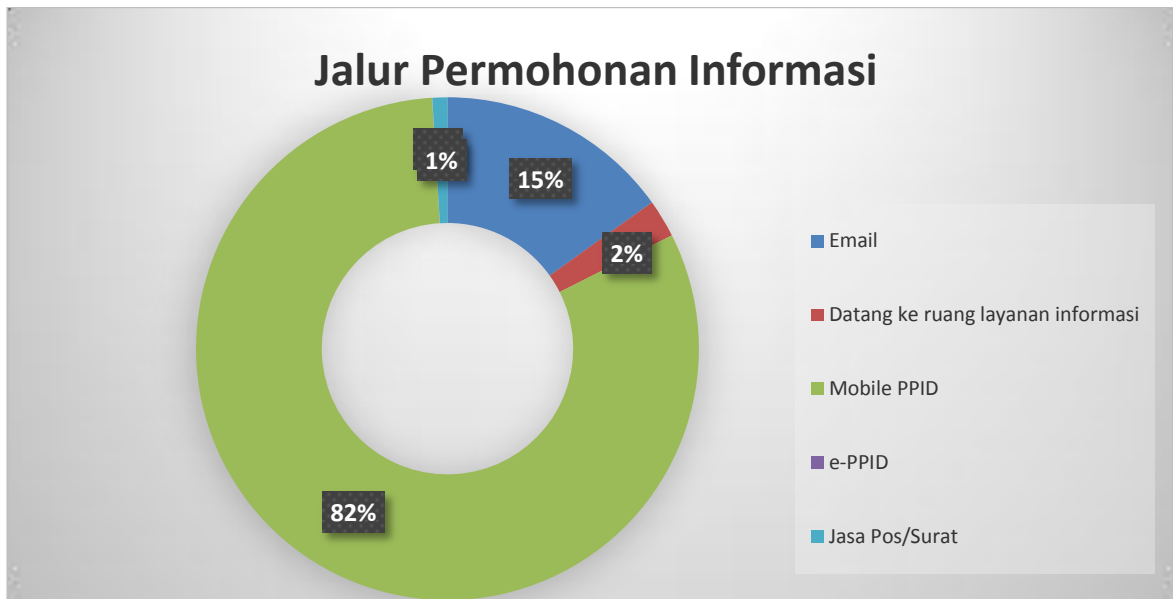
Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) antara lain menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab Kepala Biro KLI, selaku PPID Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/PMK.01/2016), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/15>;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/17>; dan
- c. informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/16> (pada periode Januari s.d. April 2019 tidak terdapat informasi dimaksud yang perlu diumumkan).

Pada periode bulan Januari s.d. April 2019, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan telah menerima **205** permohonan informasi publik, dengan rincian sebagai berikut:

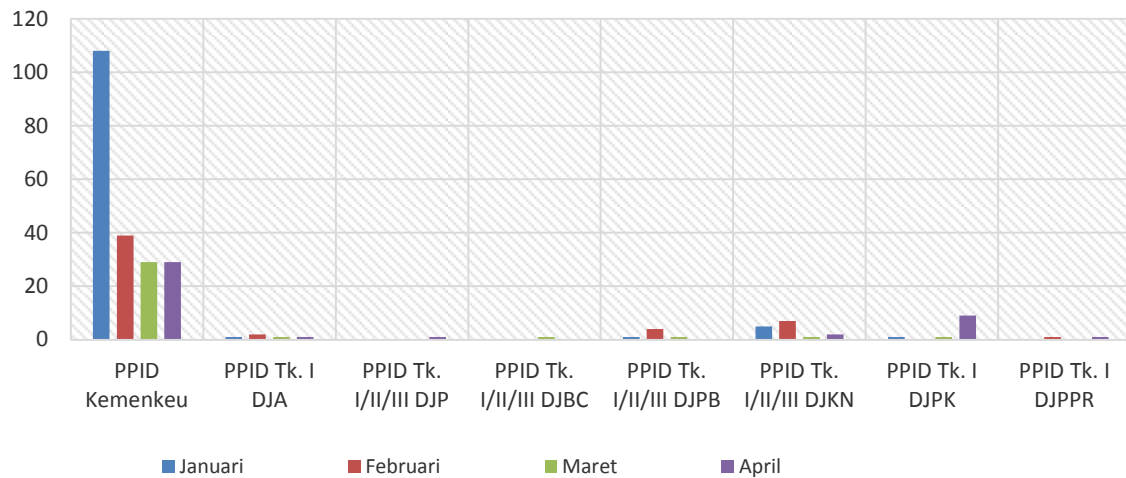
- a. 167 permohonan informasi publik diterima melalui *mobile* PPID;
- b. lima permohonan informasi diterima langsung dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik;
- c. 31 permohonan informasi publik diterima melalui *email* [ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id); dan
- d. dua permohonan informasi publik diterima melalui jasa pos.



Selain permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan, terdapat empat puluh permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

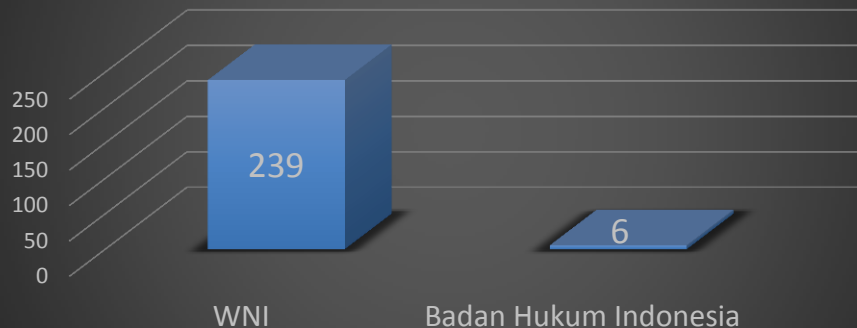
- a. empat permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- b. satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- c. satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- d. enam permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);
- e. lima belas permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- f. sebelas permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); dan
- g. dua permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

### Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Struktur PPID Kementerian Keuangan



Berdasarkan kedudukan hukum Pemohon, maka dari **245** permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, **239** diantaranya diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan enam permohonan informasi diajukan oleh badan hukum Indonesia.

### Status Hukum Pemohon



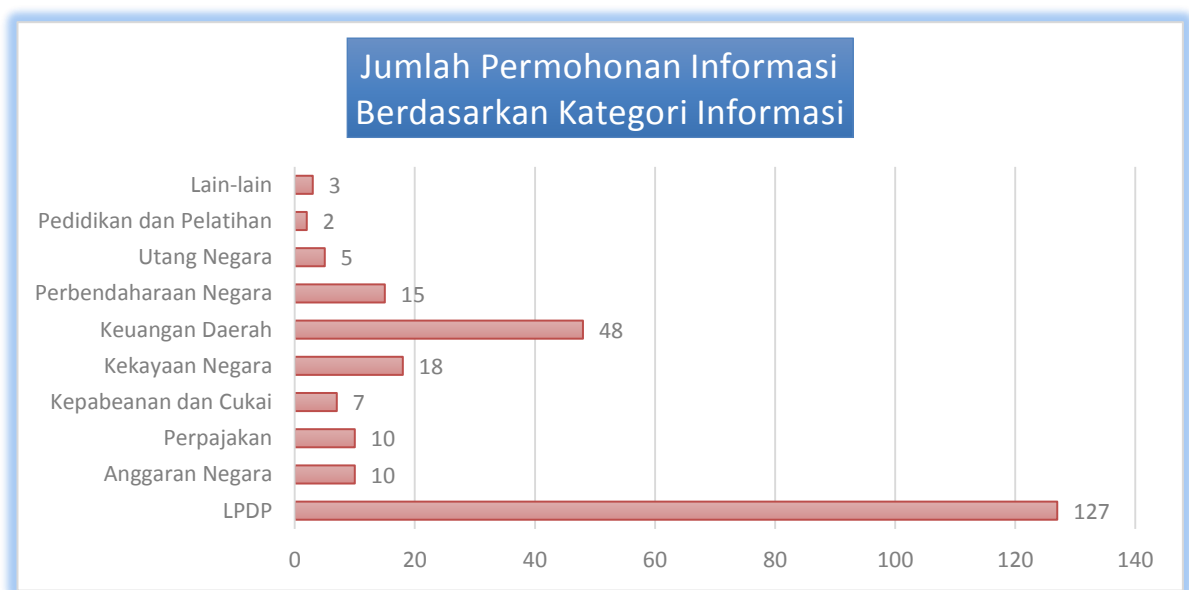
Jika ditinjau dari materi permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 127 permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- sepuluh permohonan informasi publik mengenai anggaran negara;
- sepuluh permohonan informasi publik mengenai perpajakan;
- tujuh permohonan informasi publik mengenai kepabeanaan dan cukai;
- delapan belas permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara;
- 48 permohonan informasi publik mengenai keuangan daerah;
- lima belas permohonan informasi publik mengenai perbendaharaan negara;

- h. lima permohonan informasi publik mengenai utang negara;
- i. dua permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan; dan
- j. tiga permohonan informasi publik mengenai lain-lain.

Hingga tanggal 30 April 2019:

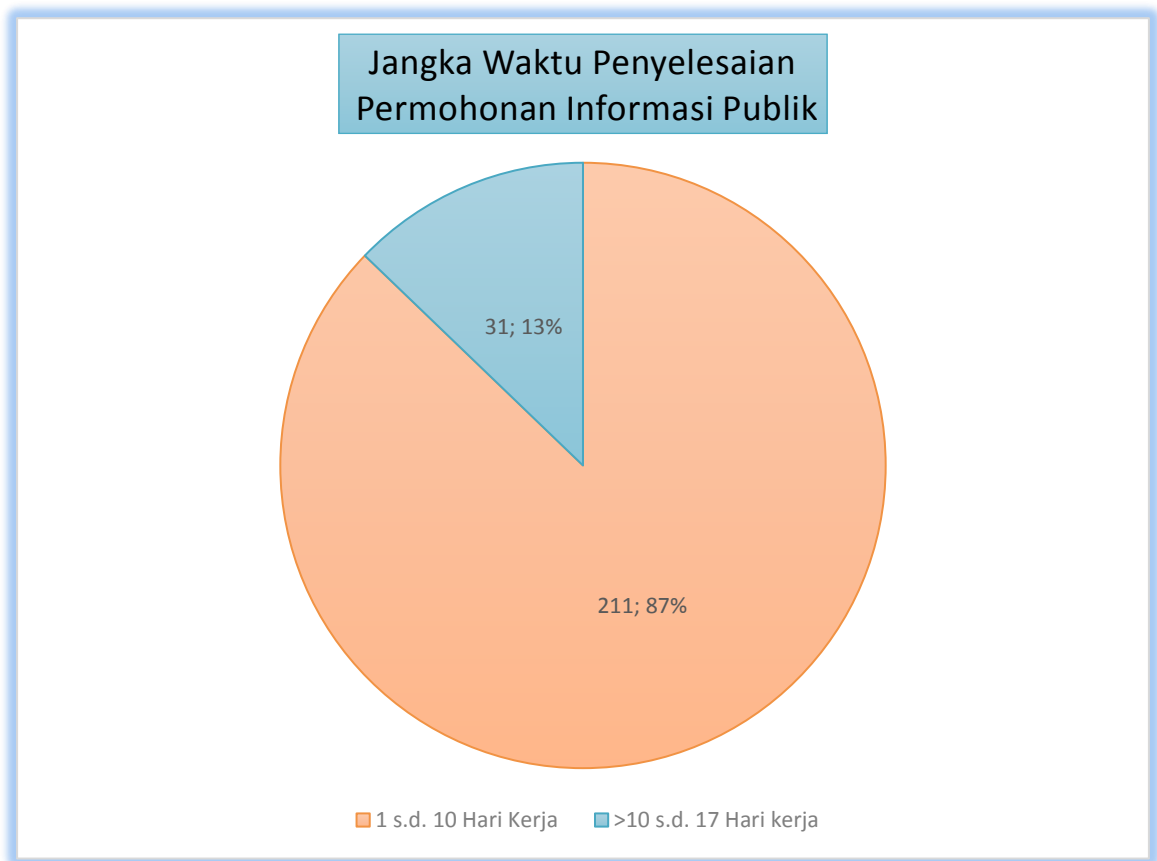
- a. 32 permohonan informasi publik yang diterima pada bulan Desember 2018 telah selesai ditanggapi pada bulan Januari 2019;
- b. 242 permohonan informasi publik yang diterima pada periode bulan Januari s.d. April 2019 telah selesai ditanggapi; dan
- c. tiga permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan Mei 2019.



Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, dapat dirinci lagi berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu:

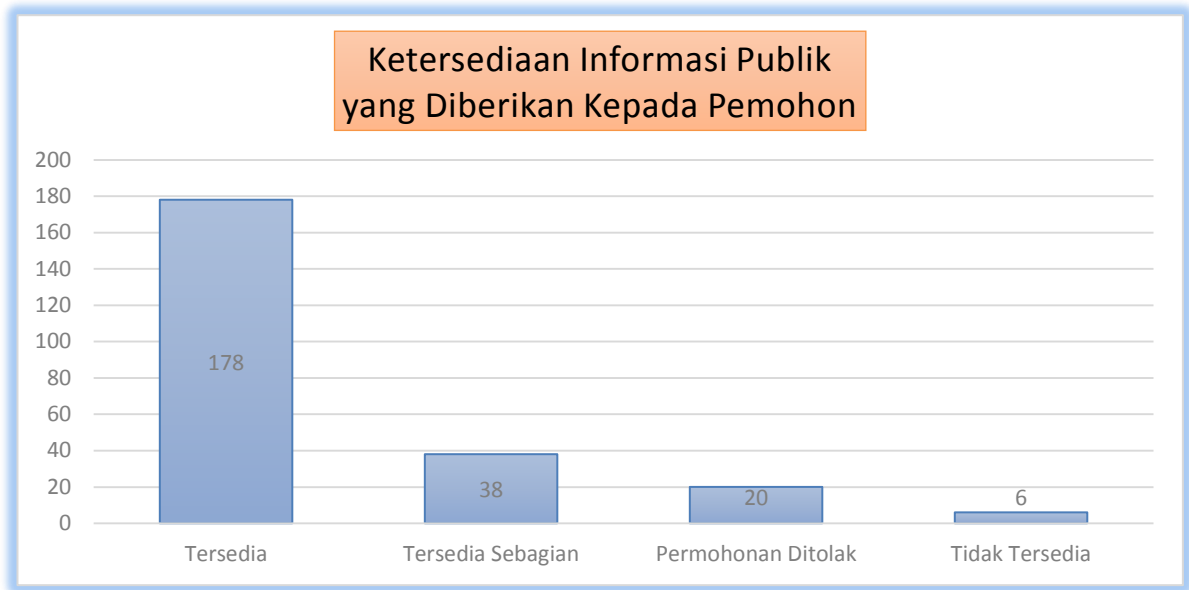
- a. **211** permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari kerja; dan
- b. **31** permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu sebelas sampai dengan tujuh belas hari kerja.

Dengan demikian rata-rata waktu layanannya yaitu **7,4** hari kerja  $\approx 7$  hari kerja. Jika dibandingkan dengan layanan periode empat bulan sebelumnya, maka waktu layanan tidak berubah.



Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan kepada Pemohon (**245** permohonan), dapat dirinci sebagai berikut:

- a. informasi publik yang diminta tersedia seluruhnya, 178 permohonan,;
- b. informasi publik yang diminta tersedia sebagian, 38 permohonan,; dan
- c. informasi publik yang diminta tidak tersedia karena merupakan informasi yang dikecualikan (penolakan informasi publik), dua puluh permohonan; dan
- d. informasi publik yang diminta tidak tersedia karena tidak dikuasai Kementerian Keuangan, enam permohonan.



## B. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 huruf p PMK 200/PMK.01/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud yaitu sebagai berikut.

- a. Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang sedang dalam proses pembahasan yang dapat diakses melalui <http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id/Content/upload/1371418666-Daftar%20RUU%202019.pdf>.
- b. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya. Informasi tersebut dapat diakses melalui <http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id/Content/upload/465730051-Statistik-%20WISE.pdf>.
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian Keuangan berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/>.

## C. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2019, PPID Kementerian Keuangan telah menerima lima keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID

Kementerian Keuangan. Empat dari keberatan tersebut telah selesai diproses, sedangkan satu keberatan masih dalam proses penyusunan jawaban.

Selanjutnya, pada periode ini, PPID Kementerian Keuangan masih melanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan, yaitu sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 015/VI/KIP-PS/2018, antara Sdr. Ibnu Hajar S.H. sebagai Pemohon terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Termohon pada tanggal 25 Januari, 21 Februari, 26 Februari, 18 Maret, dan 10 April 2019 di Komisi Informasi Pusat.

#### **D. Kegiatan Lain PPID Kementerian Keuangan**

Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2019, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut ini.

- a. Melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, yang merupakan salah satu kewajiban Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Pengganti PMK 200/PMK.01/2016.
- c. Melaksanakan rapat penyusunan RPMK Pengganti PMK 200/PMK.01/2016 dengan Biro Hukum, dengan agenda *legal drafting* RPMK Pengganti PMK 200/PMK.01/2016, pada tanggal 19 Maret 2019.
- d. Melakukan pengujian konsekuensi atas permohonan informasi publik, yaitu:
  - 1) nomor pendaftaran 162/PPID.KK/2019 mengenai MOU Penempatan lulusan PKN STAN Tahun 2018 dengan mitra Kemenkeu, pada tanggal 28 Maret 2019; dan
  - 2) nomor pendaftaran 168/PPID.KK/2019 mengenai surat Menteri Keuangan Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK-03/2005, pada tanggal 9 April 2019.
- e. Menghadiri *Focussed Group Discussion* (FGD) berikut ini.
  - 1) Revisi Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 12 Februari 2019.
  - 2) Perlindungan Hukum ASN yang diselenggarakan oleh Biro Advokasi Kementerian Keuangan, pada tanggal 28 Maret 2019.

- f. Menghadiri *talkshow* dengan tema “Pemilu Untuk Negeri” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 11 April 2019.
- g. Menghadiri rapat sebagai berikut:
  - 1) penyusunan Peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur mekanisme penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Kurs Pajak yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, pada tanggal 21 Januari 2019; dan
  - 2) pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, pada tanggal 15 s.d. 16 April 2019.
- h. Menjadi narasumber pada kegiatan berikut ini.
  - 1) FGD pada Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 29 Januari 2019.
  - 2) *Benchmark* kehumasan Ombudsman Republik Indonesia, pada tanggal 28 Januari 2019.
  - 3) Kunjungan kehumasan Kementerian Sekretariat Negara, pada tanggal 13 Februari 2019.
  - 4) Diskusi panel dengan tema “Membangun Kesadaran Digital Generasi Milenial dalam Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 21 Maret 2019.
  - 5) Rapat Dalam Kantor (RDK) Sosialisasi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Bali, pada tanggal 26 Maret 2019.
  - 6) Forum PPID di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 2 April 2019.
  - 7) Bimbingan teknis aplikasi PPID Kanwil DJP Jakarta Khusus, pada tanggal 23 April 2019.
  - 8) Seminar dan peluncuran *re-design website* PPID Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, pada tanggal 30 April 2019.
- i. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara, yaitu sebagai berikut:
  - 1) PPID PT. Pertamina (Persero), pada tanggal 26 Maret 2019; dan
  - 2) PPID Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), pada tanggal 11 April 2019.

Demikian laporan empat bulanan PPID Kementerian Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4) PMK 200/PMK.01/2016 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan.